

Interpol Buru Haksono Santoso, Tersangka Kasus Penggelapan yang Masuk DPO

Category: NASIONAL

written by Redaksi | 16/11/2024

POLRI DAERAH METROPOLITAN JAKARTA RAYA
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM
Jln. Jend. Sudirman No. 55 Jakarta Selatan 12190

S-35

" PRO JUSTITIA "



DAFTAR PENCARIAN ORANG
Nomor: DPO/S-34/172 /XI/2024/Ditreskrimum/Polda Metro Jaya

	Untuk diawasi/ditangkap/ diserahkan/dinformasikan keberadaannya kepada penyidik c	atau Tersebut dalam surat permintaan dari: Nomor : Tanggal :
--	--	--

Data lengkap tersangka:

1. Nama, nama kecil, gelar, nama samaran dan sebagainya	HAKSONO SANTOSO
---	-----------------

BANDA ACEH – Namanya viral lima tahun silam, Haksono Santoso, pengusaha tambang timah resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana penggelapan. Ia juga masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) lantaran diduga sudah kabur ke luar negeri sehingga bakal diburu Interpol, usai dimasukkan ke dalam daftar red notice.

Mengutip dokumen surat bernomor DPO/S-34/172/XI/2024/Ditreskrimum/ Polda Metro Jaya, yang beredar di berbagai kalangan dan papan pengumuman kantor Polda seluruh Indonesia, Jumat (15/11/2024), Haksono diduga melakukan pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP senilai 2 juta dolar AS.

"Kasus terjadi di Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara pada

sekitar tahun 2023," tulis surat yang ditandatangani langsung oleh Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrim) Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Wira Satya Triputra dikutip di Jakarta, Sabtu (16/11/2024).

Kabid Humas Polda Metro Kombes Pol. Ade Ary Syam Indradi, sudah memberikan konfirmasi bahwa benar Haksono Santoso telah ditetapkan sebagai tersangka dan dimasukkan dalam daftar DPO tersebut. Namun, Ade mengaku belum mengetahui secara pasti sosok Haksono Santoso yang terseret kasus penggelapan.

"Berdasarkan data dalam lintasan, Haksono Santoso sudah berada di luar negeri. Bila tak kembali dalam waktu dekat akan diajukan ke Interpol untuk dimasukkan ke daftar red notice," tukasnya.

Dalam dokumen DPO itu juga terpasang foto tersangka, disertai profil ringkas dan alamat tempat tinggalnya, yang berlokasi di Perumahan Garden Raya, Kawasan Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Dokumen juga melekatkan kalimat pesan kepada masyarakat yang mengetahui keberadaan tersangka agar melaporkan ke penyidik atau kantor polisi terdekat.

"Untuk diawasi, ditangkap, diserahkan, atau diinformasikan keberadaannya kepada penyidik," bunyi dokumen tersebut.

Siapa Haksono Santoso?

Haksono Santoso sempat populer di kisaran tahun 2019-2020. Pengusaha kelahiran Salatiga, 60 tahun lalu itu, erat dengan posisi yang melekat pada dirinya sebagai komisaris PT Aries Kencana Sejahtera (AKS). Salah satu perusahaan tambang timah terkemuka ini aktif beroperasi di Indonesia.

Menengok ke belakang, pada 2019, PT AKS disebut kepolisian terlibat dalam kasus kejahatan ekspor balok timah tanpa izin. Ketika itu, tim penyidik dari Direktorat Tindak Pidana

Tertentu (Tipidter) Bareskrim Mabes Polri sempat menyelidiki dugaan adanya pelanggaran dalam rencana ekspor 150 ton balok timah milik perusahaan peleburan timah (smelter) PT AKS.

"Kami akan melanjutkan penyidikan apabila ternyata memang diketemukan dua alat bukti, agar mendapatkan kepastian hukum," ujar Brigjen Drs. Nunung Syaifuddin, S.I.K, M.M, Dirtipiter Bareskrim Polri, ketika dihubungi wartawan.

Baca juga: Polda Metro Jaya Ungkap Peran 12 Karyawan di Kasus Judi Online, Buru Dua DPO Utama

Pada 9 Desember 2019, diberitakan, penyidik dari Bareskrim sudah tiba di Bangka untuk mulai melakukan penyelidikan dokumen dan keabsahan timah PT AKS.

Esok harinya, 10 Desember 2019, PT AKS sendiri dijadwalkan hendak melakukan ekspor enam kontainer balok timah atau sebanyak 150 ton.

Rencana PT AKS menggelar acara launching ekspor timah di gudang Pusat Logistik Berikat PT Tantra Karya Sejahtera (TKS) yang berada di Ketapang, Kecamatan Pangkalbalam, Kota Pangkalpinang, pun sudah disiapkan. Namun acara tersebut batal. Itu diduga lantaran adanya pemeriksaan oleh penyidik Bareskrim yang didampingi Ditreskrimsus Polda Bangka Belitung.

Kontroversi Undangan KSP dan Dugaan Intervensi

Kontroversi pun terjadi. Ketika hiruk pikuk di Bangka belum lagi reda, beredar copy undangan dari kantor Kepala Staf Presiden (KSP) – yang ketika itu dipimpin Jenderal Purn. Moeldoko. Undangan ditujukan kepada dua petinggi PT AKS, yakni Haksono Santoso selaku komisaris dan Samuel Santoso selaku direktur utama.

Menariknya, selain Haksono dan Samuel, KSP juga mengundang

Direktur Tipidter Bareskrim Mabes Polri (ketika itu) Brigjen Pol. Agung Budijono. Pertemuan diagendakan berlangsung Kamis, 2 April 2020, pukul 10.00 – 12.00 di Ruang Rapat Kedeputian I Kantor KSP di Binagraha.

Undangan menyebut akan membahas soal penerapan praktik pertambangan yang berkelanjutan. Disebutkan juga dasar pemanggilan KSP adalah dalam pelaksanaan pengelolaan serta monitor isu strategis sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden, khususnya di Bidang Pertambangan dan Lingkungan.

Akan tetapi, undangan khusus itu sontak memicu kegaduhan. Ada dugaan undangan KSP sengaja dikondisikan Haksono untuk intervensi kasus. Beberapa anggota DPR RI ketika itu menyoroti urgensi pemanggilan Haksono dan Samuel oleh KSP.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Gerindra Habiburokhman misalnya, terang-terangan mempertanyakan pemanggilan PT AKS yang diketahui sempat terseret hukum soal ekspor timah yang dianggap polisi tak berizin itu.

"Saya bingung, apa relevansi bisnis PT AKS dengan tupoksi KSP sampai dipanggil begitu. Seharusnya, soal manajemen, PT Timah yang lebih relevan dan Kementerian BUMN. Apa enggak berlebihan sampai panggil pihak swasta begitu?" ungkap Habiburokhman, kepada awak media, Kamis (2/4/2020).

Yang juga jadi soal, lanjut Habiburokhman, pemanggilan KSP terjadi ketika Indonesia, khususnya Jakarta, saat itu sedang dalam keadaan gawat darurat karena pandemi Covid-19.

Undangan KSP yang memaksakan rapat pertemuan tatap muka, bukan zoom meeting, dianggap melawan keputusan Presiden yang sudah tegas menginstruksikan masyarakat untuk bekerja dari rumah (work from home).

Komoditas Timah yang Curi Perhatian

Sambil menunggu penjelasan Polda Metro Jaya terkait dugaan penggelapan yang dilakukan Haksono Santoso di Pluit, penting dicatat, komoditas timah belakangan memang mencuri perhatian publik. Terutama, pasca terungkapnya kasus dugaan korupsi dalam tata niaga timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah, Tbk 2015-2022.

Seharusnya penyidikan pada Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) RI ikut menetapkan Haksono Santoso sebagai tersangka.

Dalam kasus mega korupsi yang merugikan negara hingga Rp271 triliun ini, Kejagung menetapkan 16 tersangka, termasuk suami artis Sandra Dewi, Harvey Moeis dan 'Crazy Rich' Helena Lim. Haksono Santoso belum tersentuh.

Setelah mencuatnya kasus tersebut, tak bisa dipungkiri, komoditas timah memang terbukti menggiurkan. Mengutip data Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM, pada 2024 setidaknya bahkan terdapat 537 IUP yang terdiri dari 3 IUP eksplorasi dan 534 IUP operasi produksi.

Industri tambang timah memang salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia. Sebab, timah merupakan komoditas yang memiliki banyak cadangan. Wajar jika komoditas ini banyak dicari dan dieksploitasi oleh sejumlah perusahaan tambang.

Booklet Peluang Investasi Timah di Indonesia yang diterbitkan Kementerian ESDM menyebutkan, cadangan logam timah sebagian besar terdapat di Kepulauan Bangka Belitung, mencapai 91 persen. Sedangkan cadangan timah lainnya tersebar di Riau, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Barat.

Pada 2019, dengan hasil produksi mencapai 78.189 ton, Indonesia menempati posisi terbesar kedua di dunia sebagai produsen logam timah. Posisi pertama ditempati China dengan

produksi timah sebesar 166.600 ton. Di Indonesia, saat ini terdapat 25 perusahaan timah terkemuka dan aktif. Di antaranya, PT Aries Kencana Sejahtera (AKS) itu, dan PT Timah, Tbk tentu saja.